

BIBIT NASIONALISME DI KALANGAN PENDUDUK TIONGHOA DI INDONESIA

Nationalism Breeding among Chinese Population in Indonesia

Retnaningtyas Dwi Hapsari

Staff Program dan Dokumentasi Filantropi Indonesia
e-mail: retnaningtyas.rh@gmail.com

Naskah Diterima: 1 Agustus 2016
Naskah Direvisi: 3 November 2016
Naskah Disetujui: 4 November 2016

Abstract

This narrative article is intended to determine the relationship between education reform during the Dutch East Indies against nationalist orientation of Chinese. The discussions in this paper mainly focuses issues on pioneer movement, impact of educational reform, and the Chinese community's role in Indonesia's independence efforts. This paper is written based on the results of the research on the events. It applies historical method, which is based on four issues, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Discrimination education do the Dutch government to make the establishment of independent Chinese schools were pioneered by an organization. The partnership between these schools with the country of China raised suspicions about the nationalist orientation of Chinese. Dualism nationalism going on inside of Chinese, their sided with the country of China, their stay loyal to the Netherlands, but some are aligned to Indonesia. This split makes it difficult for the Chinese to make a good deal in the field of education and politics.

Keywords: educational reform, nationalism, ethnic discrimination, Chinese minority, Indonesia, China.

Abstrak

Tulisan naratif ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara reformasi pendidikan pada masa Hindia Belanda terhadap orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Pembahasannya meliputi pelopor pergerakan, dampak reformasi pendidikan, dan peran komunitas Tionghoa dalam upaya kemerdekaan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peristiwa yang telah lama terjadi, yang menggunakan metode sejarah, bertumpu pada empat hal yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adanya diskriminasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda membuat pendirian sekolah Tionghoa secara mandiri yang diprakasi oleh sebuah organisasi. Jalinan kerjasama antara sekolah ini dengan negeri China menimbulkan kecurigaan tentang orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Dualisme nasionalisme terjadi di dalam tubuh penduduk Tionghoa, adanya yang memihak kepada negeri China, adanya tetap setia kepada Belanda, tetapi ada pula yang memihak ke Indonesia. Perpecahan ini membuat penduduk Tionghoa sulit untuk dapat membuat suatu kesepakatan baik dalam bidang pendidikan maupun politik.

Kata kunci: reformasi pendidikan, nasionalisme, diskriminasi, penduduk Tionghoa, Indonesia, China.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam tetapi juga akan keragaman etnis, budaya, dan agama. Diperkirakan jumlah etnis di Indonesia sebanyak 300 lebih dengan keberagaman suku

hingga 1000 lebih. Tidak mudah untuk dapat menciptakan kerukunan dan kerjasama di tengah perbedaan. Dalam sejarah Indonesia sudah tercatat sering terjadi aksi kekerasan komunal terhadap etnis–etnis tertentu. Diantara etnis–etnis tersebut, etnis Tionghoa kerap menjadi sasaran kekerasan. Mengingat bahwa penduduk Indonesia lebih memiliki kedekatan

hubungan budaya dengan budaya Tionghoa daripada budaya lain. Sikap antipati terhadap etnis minoritas Tionghoa muncul tidak secara tiba-tiba. Kondisi ini merupakan warisan dari politik kolonial yang masih dipelihara banyak orang hingga sekarang. Salah satu akibat dari kondisi ini adalah munculnya stereotip yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa adalah orang asing atau bukan termasuk pribumi, sehingga rasa nasionalismenya terhadap tanah air Indonesia patut dipertanyakan.

Menjadipertanyaan besar bagi banyak pihak, apakah benar pernyataan yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa tidak memiliki rasa nasionalisme. Untuk dapat menemukan jawabannya, maka harus kembali untuk melihat bagaimana sejarah penduduk Tionghoa di Nusantara pada masa lampau. Apabila melihat dari sejarahnya, perantau Tionghoa yang tinggal menetap di Nusantara telah mempunyai sejarah yang panjang. Ada beberapa penyebab migrasi mereka seperti berdagang, penyebaran agama, melarikan diri karena memiliki masalah politik, dan sebagainya. Diperkirakan mulai 1500 tahun yang lalu gelombang migrasi warga China ke Nusantara mulai terjadi. Jarang timbul permasalahan antara para pendatang ini dengan penduduk pribumi.

Masalah mulai muncul ketika bangsa Belanda datang dan berkuasa di Nusantara. Selama berkuasa, mereka menerapkan kebijakan sistem stratifikasi untuk penduduknya. Secara garis besar pembagian golongan masyarakat ini memiliki tiga tujuan yaitu, agar pemerintah mudah mengendalikan penduduk; dengan adanya jurang sosial pemisah maka penduduk akan sulit untuk membuat kesatuan; dan berkaitan dengan pembelian upah pekerja.

Pada tahun 1623, Gubernur Jenderal Pieter Carpentier mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi soal kekurangan tenaga kerja dengan melakukan migrasi secara besar-besaran dari berbagai daerah pesisir China dan memaksa para perantau Tionghoa untuk tinggal menetap. Kemudian menganggap bahwa setiap orang Tionghoa yang lahir di Nusantara sebagai warga negara Belanda. Kapitalisme yang dianut

bangsa Belanda menjadikannya harus dapat berhasil untuk menguasai daerah jajahannya secara penuh dengan berbagai cara.

Selama berkuasanya pemerintahan Hindia Belanda, penduduk pribumi merupakan golongan yang paling menderita. Meskipun demikian pemerintah memberikan porsi perhatian yang besar kepada mereka. Tidak demikian halnya dengan Tionghoa yang digolongkan ke dalam Timur Asing. Meskipun keturunan Tionghoa telah beberapa generasi tinggal di Hindia Belanda, tetapi pemerintah masih menganggap mereka sebagai orang asing.

Tionghoa sering dimanfaatkan sebagai perantara oleh pemerintah. Mereka menjadi perantara antara pemerintah dengan penduduk pribumi dalam bidang ekonomi. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh Tionghoa, misalnya pemungut pajak, pedagang candu membuat mereka dibenci penduduk pribumi. Oleh karena itu, Tionghoa diposisikan sebagai minoritas perantara yang memiliki kedudukan ekonomi mapan namun secara politis dibenci penduduk pribumi.¹

Rusaknya hubungan baik para perantau Tionghoa ini dengan penduduk pribumi akibat kebijakan politik *divide et impera* yang diambil pemerintah saat itu. Untuk memungut pajak kepada penduduk, pemerintah tidak mengambilnya secara langsung. Tetapi menjadikan para penduduk Tionghoa ini sebagai pemungut pajak dan upeti. Pekerjaan ini tidak dapat ditolak, karena penduduk Tionghoa tidak memiliki sosok pelindung yang memiliki kuasa. Dengan cara ini penduduk Tionghoa dijadikan tameng pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah juga membuat kebijakan pemisahan pemukiman setiap golongan penduduk. Hal ini terkadang menimbulkan rasa curiga dari masing-masing pihak. Upaya untuk mencegah interaksi antara penduduk Tionghoa dan pribumi ini nyatanya berhasil dan masih diwariskan hingga sekarang.

¹ Dwi Kwartanada, "Perang Jawa (1825-1830) dan Implikasinya pada Hubungan Cina-Jawa", dalam Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, h. X-XI.

Memasuki abad ke-20 mulai terjadi perubahan dinamika kehidupan di Hindia Belanda. Perubahan ekonomi dan perluasan birokrasi menyebabkan timbulnya tuntutan bagi pekerja profesional yang lebih dari kemampuan baca dan tulis. Politik etis dilahirkan dengan salah satu tujuannya untuk memperbaiki pendidikan pribumi. Bersama dengan itu, segelintir penduduk Tionghoa mendirikan *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) pada 1901 di Batavia. Dapat dikatakan bahwa organisasi ini merupakan organisasi pergerakan pertama Tionghoa. Awalnya hanya bergerak di bidang budaya kemudian masuk ke pendidikan dan politik. Sekolah THHK yang menjadi pelopor sekolah berkualitas bagi penduduk Tionghoa.

Diluar dugaan, sekolah THHK mendapat sambutan baik dan mendirikan cabangnya di kota lain. Kondisi ini membuat kekhawatiran bagi pemerintah Hindia Belanda. Disebabkan karena kurikulum sekolah ini tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintahan saat itu. Dianggap bahwa kurikulum sekolah THHK berorientasi ke negeri China. Pemerintah memandang bahwa sekolah THHK dapat membangkitkan semangat nasionalisme terhadap negeri China. Hal ini dianggap akan mengganggu jalannya pemerintahan dan bisa saja akan menimbulkan gejolak politik di dalam negeri Hindia Belanda. Pemerintah mulai merespons keadaan ini dengan mendirikan *Hollandsche Chineesche School* (HCS) yang pertama pada tahun 1908 di Batavia.² Sekolah ini dikhususkan untuk penduduk Tionghoa. Bahasa pengantarnya menggunakan Bahasa Belanda dan menjadi sekolah saingan bagi sekolah THHK.

Bibit-bibit kesadaran akan rasa kebangsaan dan nasionalisme mulai tumbuh akibat adanya reformasi pendidikan. Para intelektual yang lahir dari proses tersebut menyadari akan identitas baru yang didapatkan dari ilmu pengetahuan, berita-berita internasional, serta kontak dengan berbagai orang. Perubahan yang dirangsang dari pengaruh pendidikan telah

memunculkan keberanian penduduk Tionghoa untuk menyuarakan aspirasinya. Awalnya supremasi dan tekanan dari bangsa barat menjadi sasara utama. Mereka menginginkan agar derajat penduduk Tionghoa sejajar dengan bangsa barat serta bangsawan pribumi. Seiring perubahan waktu, etnis minoritas ini semakin dalam masuk ke dalam aktivitas politik di Hindia Belanda.

Nantinya kajian ini akan membahas bagaimana para pelopor menandai kemunculan aksi politik etnis Tionghoa di Hindia Belanda. Upaya mereka untuk berperan dalam politik berkaitan dengan kesadaran jiwa nasionalisme. Adanya kesadaran bahwa mereka satu bangsa yang sama dan satu nenek moyang, tidak membuat etnis Tionghoa bersepakat dalam menentukan aliran politiknya. Mereka terbagi ke dalam tiga aliran yaitu, pendukung pemerintah Belanda, pendukung negeri China, dan pendukung kemerdekaan.

Sejalan dengan perubahan yang dialami penduduk Tionghoa, penduduk pribumi juga mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang sosial politik. Pada akhirnya para nasionalis dari kedua golongan yang berbeda ini yaitu Tionghoa dan pribumi dapat saling bekerjasama. Mereka menyadari bahwa wilayah yang mereka tinggali ini juga merupakan rumah bagi banyak etnis. Oleh karena itu, agar dapat terciptanya suatu cita-cita kemerdekaan maka terlebih dahulu harus dapat terjalin kerjasama yang baik antar etnis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran THHK di bidang sosial politik dalam komunitas Tionghoa?
2. Apa dampak dari reformasi pendidikan penduduk Tionghoa?
3. Bagaimana sikap nasionalisme penduduk Tionghoa?

C. Tujuan Penulisan

Alasan mengapa pandangan nasionalisme Tionghoa penting untuk dibahas, karena oleh sebagian penduduk pribumi mereka masih dianggap pendatang meskipun telah

² "Regenering Alamanak 1930", Arsip Nasional Indonesia, h. 348.

tinggal hingga bergenerasi. Sementara itu oleh pemerintah Hindia Belanda, penduduk Tionghoa dikategorikan orang asing. Tulisan ini akan membahas bagaimana konflik yang terjadi dalam komunitas Tionghoa yang membuat mereka sulit untuk bersatu. Kemudian kajian ini juga akan mendiskripsikan jalan awal timbulnya rasa kesadaran akan persatuan bangsa serta peran mereka bersama para tokoh pribumi untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemerdekaan.

D. Teori/Kerangka Pemikiran

Pendidikan, baik itu formal dan nonformal merupakan suatu sarana untuk memberikan ilmu secara luas melalui lembaga. Pengertian lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Sebuah lembaga memiliki sistem yang terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.³ Lembaga pendidikan dikembangkan sebagai suatu upaya sistematis untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dipelajari di dalam keluarga.⁴

Pendidikan formal didapatkan melalui lembaga pendidikan yaitu sekolah yang memiliki jenjang dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.⁵ Sekolah formal merupakan sekolah yang masuk dalam sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah. Selain itu juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Berdasarkan sumber dananya sekolah formal memiliki dua jenis yaitu sekolah pemerintah dan sekolah swasta. Menurut Philip Robinson sekolah memiliki ciri-ciri yaitu: formalitas, hieraki, tujuan yang jelas, lama pendidikan, dan besar dan kompleksnya.⁶ Di sisi lain, pendidikan tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga dapat digunakan untuk menanamkan suatu ideologi

politik tertentu ke siswanya. Sistem pendidikan tidak dapat lepas dari dinamika politik yang sedang berlangsung.

Secara umum, nasionalisme memiliki arti suatu kesadaran atau sentimen untuk memiliki atau mencintai suatu bangsa.⁷ Menurut Hans Kons, nasionalisme timbul karena adanya suatu kesadaran nasional atau *national consciousness*. Timbulnya rasa nasionalisme dalam diri suatu bangsa didasarkan pada banyak hal. Diantaranya letak geografis, persamaan genetika, persamaan budaya, ikatan sejarah, dan sebagainya.

Mengingat bahwa Negara Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa yang berbeda maka Indonesia merupakan negara multietnis, tidak dibangun atas kepentingan satu golongan serta tidak berdasarkan kelas. Persatuan dan kesepakatan diantara komunitas budaya yang berbeda menjadi acuan negara ini. Oleh karena itu jiwa nasionalis akan mulai muncul ketika seseorang bisa memahami dan menghormati perbedaan budaya ini.

Dibandingkan dengan etnis lain, jiwa nasionalis penduduk Tionghoa sering mendapatkan sorotan dan menjadi bahan diskusi. Terdapat stereotipe yang mendiskreditkan peran mereka hanya sebatas dominasi bidang ekonomi saja. Sehingga mereka hanyalah orang-orang yang mencari keuntungan saja. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka pada awalnya adalah perantau yang datang dari negeri China. Oleh karenanya, pencarian jati diri kebangsaan mereka berkaitan dengan perubahan zaman.

Penduduk Tionghoa pada masa Hindia Belanda mengalami kebingungan dalam menentukan kesatuan pilihan nasionalisme dalam komunitasnya. Secara genetik dan budaya, penduduk Tionghoa di Hindia Belanda memiliki ikatan dengan negeri China. Sementara itu tidak bisa dipungkiri bahwa mereka yang telah tinggal lama, bahkan hingga beberapa generasi telah menetap di Hindia Belanda tentunya telah mengalami akulturasi dan asimilasi budaya dengan budaya setempat. Kesadaran akan perasaan satu

³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi* Jilid 1, terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984, h. 224.

⁴ *Ibid.*, h. 358.

⁵ *Ibid.*, h. 334.

⁶ Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 238-239.

⁷ Anthony D. Smith, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, h. 6.

bangsa membutuhkan kedewasaan pandangan politik dan hal tersebut membutuhkan proses waktu, tidak dapat tumbuh secara tiba-tiba. Dalam hal ini pendidikan memiliki peran penting, karena sejatinya pendidikan adalah proses memerdekakan seseorang. Ketika telah banyak penduduk Tionghoa yang menjadi intelektual, mereka memiliki peran dalam upaya mencapai kemerdekaan negara ini. Dengan demikian, mereka dengan sendirinya telah mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat Indoeseia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penulisan sejarah. Dalam ilmu sejarah, metode penelitian dibagi ke dalam empat langkah yang mana setiap langkahnya memiliki peran penting terhadap hasil penelitian yang akan didapat.

1. Heuristik

Penelitian sejarah merupakan penulisan ulang peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu agar hasil penelitian yang didapat relevan dan bisa dipertanggung jawabkan, maka penelitian harus didasarkan pada fakta yang diperoleh dari sumber data yang jelas. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber primer berupa arsip dan koran sejaman didapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, dan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah. Sementara sumber sekunder merupakan data yang didapat dari literatur, baik buku sejaman ataupun tidak.

2. Kritik

Setelah mendapatkan sumber data, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik. Tahapan ini dibagi dua. Pertama, kritik eksteren yang digunakan untuk mengetahui keotentikan sumber. Guna memastikan bahwa sumber itu otentik, sumber yang digunakan harus merupakan sumber yang dikehendaki, sumber harus asli atau tidak turunan, dan sumber harus utuh. Kedua, kritik interen yang diperlukan untuk mendapatkan kredibilitas atau kebenaran sumber. Caranya, sumber-sumber yang telah didapat saling dibanding-bandingkan satu sama

lain sehingga dapat diperoleh sumber yang dapat dipercaya.

3. Interpretasi

Sumber-sumber yang telah diteliti atau dilakukan kritik eksteren dan interen, kemudian disusun dengan cara menghubungkan-hubungkan sumber yang satu dengan yang lainnya dan kemudian disusun secara kronologis.

4. Historiografi

Langkah terakhir dari proses penelitian yaitu proses penulisan kembali peristiwa di masa lampau berdasarkan data-data yang telah diperoleh setelah dilakukan proses kritik dan interpretasi sehingga data dalam pemulisan dapat dipercaya menjadi sesuatu kisah atau penyajian yang berarti.⁸

II. Pembahasan

A. Stratifikasi Penduduk Pada Era Kolonial

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menempati atau mendiami suatu wilayah tertentu. Penduduk tidak hanya orang asli yang lahir di wilayah tersebut, tetapi bisa juga orang yang lahir di wilayah lain kemudian pindah ke wilayah tersebut untuk menetap. Kedatangan orang asing yang beragam etnis membuat komposisi masyarakat di Nusantara menjadi majemuk. Secara garis besar mereka terdiri dari orang Eropa, Arab, India, Melayu, dan Tionghoa. Di samping itu ada penduduk pribumi yang menjadi penduduk berjumlah terbanyak. Golongan Timur Asing yaitu masyarakat Tionghoa memiliki jumlah terbanyak dibanding masyarakat Timur Asing lainnya. Orang Eropa khususnya Belanda berjumlah sedikit tetapi mereka yang paling berkuasa di Hindia Belanda. Tingkat kedudukan dalam stratifikasi sosial memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial, misalnya dalam mendapatkan pekerjaan dan hak memperoleh pendidikan.

a) Orang Eropa

Awalnya orang Eropa yang tinggal di Nusantara bekerja sebagai militer, pegawai sipil seperti akuntan, saudagar, asisten, kerani, dan juru tulis. Ada juga orang Eropa yang menjadi

⁸ Louis Gottschalk, 1986, h. 18

pendeta dan sukarelawan keagamaan.⁹ Banyak orang Eropa yang melakukan perkawinan campuran dengan penduduk pribumi. Hasil dari perkawinan campuran ini menghasilkan keturunan yang dikenal dengan istilah Indo: Ada tiga golongan masyarakat Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, yaitu:

- 1) Orang *Indo* yang merupakan hasil percampuran antara orang Eropa dengan pribumi. Mayoritas orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda adalah orang *Indo*. Golongan ini memiliki komunitas khusus, karena mereka memiliki status dua kewarganegaraan yaitu Eropa dan Pribumi. Jika anak *Indo* lahir dari hasil pernikahan resmi maka akan menjadi orang Eropa, tetapi jika lahir di luar pernikahan resmi dan ayahnya tidak mengakuinya maka akan menjadi golongan pribumi.¹⁰ Walaupun anak *Indo* telah diakui sebagai orang Eropa, tetapi tetap saja kedudukan mereka tidak dapat disetarakan dengan orang Eropa asli.
- 2) *Blijvers* (para penetap), adalah orang Eropa asli yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda bahkan sampai beberapa generasi. Walaupun mereka sudah menetap lama di Hindia Belanda, mereka tidak melakukan perkawinan campuran dengan penduduk pribumi sehingga keturunan yang dihasilkan masih orang Eropa totok.
- 3) *Trekkers* (para perantau), yaitu orang Eropa yang lahir di Eropa kemudian datang ke Hindia Belanda untuk bekerja dan jika masa kerjanya selesai mereka akan kembali ke Eropa.¹¹

Sejak dibukanya terusan Suez, jarak tempuh Eropa ke Hindia Belanda menjadi lebih singkat. Salah satu akibatnya adalah semakin banyak Eropa mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Hal ini membuat jumlah penduduk Eropa semakin banyak dan masyarakat Eropa semakin dipandang eksklusif.

⁹ Tineke Hellwig, *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, h. 5.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Th. Stevens, *Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, h. 255.

b) Timur Asing

Sebutan untuk Timur Asing mengacu kepada orang-orang Asia yang tinggal di Hindia Belanda. Mereka adalah orang Tionghoa, Arab, India, dan Melayu. Sebagian besar masyarakat Timur Asing adalah orang Tionghoa. Di Semarang penduduk Tionghoa merupakan penduduk terbesar kedua setelah pribumi. Dibandingkan dengan orang Arab, India dan Melayu, orang Tionghoa lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Pada awalnya mereka tinggal di Hindia Belanda hanya sementara. Tetapi setelah mereka memiliki keluarga dan usaha di sini jarang ada kembali lagi ke negeri China. Pada perkembangan selanjutnya banyak perempuan China yang datang ke Hindia Belanda. Mereka mengikuti suaminya atau menyusul suaminya yang sudah terlebih dahulu datang. Menjelang tahun 1900, sebagian besar penduduk Tionghoa yang ada di Hindia Belanda adalah keturunan keluarga Tionghoa yang sudah turun-temurun tinggal di Jawa alias peranakan. Meskipun demikian mereka masih melihat negeri China sebagai sumber kebudayaan mereka. Penduduk Tionghoa banyak yang tinggal secara berkelompok di daerah yang disebut petionghoan. Pemerintah Hindia Belanda memiliki kebijaksanaan untuk membatasi peranan orang Tionghoa dalam masyarakat. Mereka tidak boleh jadi tentara, pegawai negeri, polisi, dan sebagainya. Bidang pekerjaan yang diberikan adalah yang berhubungan dengan ekonomi dan perdagangan.

Dalam strata sosial di Hindia Belanda, penduduk Tionghoa satu tingkat lebih tinggi dari penduduk pribumi. Meskipun demikian, jika ada penduduk Tionghoa melakukan pelanggaran hukum akan diadili di pengadilan untuk penduduk pribumi. Tionghoa merasa bahwa mereka lebih baik dari penduduk pribumi karena itu menginginkan mendapatkan kebijakan hukum yang sama dengan penduduk Eropa.¹²

¹² Natalia Soebagjo, *Orang Tionghoa Menjadi Orang Indonesia*, dalam Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Mizan, 2008, h. 587.

Beberapa hal lain yang diatur bagi penduduk Tionghoa adalah persoalan tempat tinggal, bidang pekerjaan dan cara berpakaian. Pemerintah juga mengatur pakaian yang boleh digunakan oleh masyarakat Tionghoa. Hingga awal abad ke-20, pemerintah melarang orang Tionghoa memakai pakaian seperti yang dikenakan penduduk Barat, misalnya jas. Bahkan pria Tionghoa diwajibkan menguncir rambut di bagian belakang (*tocang*), sedangkan bagian depan kepala dicukur licin. Hal ini membuat mereka mendapatkan julukan *staartdrager* (pemakai ekor). Pemakaian *Tocang* ini baru mulai hilang sekitar tahun 1911. Dalam kesehariannya semua penduduk Tionghoa wajib menggunakan pakaian seperti penduduk di negeri Tionghoa. Untuk pria, pakaian mereka terdiri dari jubah panjang yang terbuat dari *nankeen* atau sutra tipis berlengan lebar hingga lutut kaku dan sebaliknya mereka memakai pakaian yang sama dengan bercelana panjang.¹³

Sementara itu para perempuan Tionghoa memakai busana yang disebut baju kurung. Terbuat dari bahan tidak transparan, memiliki belahan di bagian lehernya dan disemat dengan semacam *bros* yang disebut peniti tak. Setelah baju kurung, muncul baju trend panjang. Busana ini memiliki bukaan di bagian depan. Potongannya mirip dengan kebaya panjang, tetapi tidak disambung di bagian bahu dan lengan. Bagian dadanya dirapatkan dengan tiga buah peniti emas atau perak.¹⁴ Memasuki abad ke-20, tren pakaian perempuan Tionghoa berubah. Mereka mengadopsi pakaian yang digunakan perempuan *Indo* yaitu kebaya renda. Pakaian ini berbahan putih transparan dengan dihiasi renda halus dan bagian bawah kebaya dibuat meruncing.¹⁵

Istilah Timur Asing juga ditujukan untuk orang Arab yang ada di Hindia Belanda. Pada umumnya orang mengira bahwa tujuan orang Arab ke Hindia Belanda adalah menyebarkan

agama daripada sebagai pedagang. Sejak abad ke-19, misi tidak hanya untuk menyebarkan agama, tetapi juga mencari kekayaan.¹⁶ Mayoritas orang Arab memulai usaha dagangnya dengan modal yang kecil. Jika mereka kaya, jarang ada yang mendirikan rumah dagang yang besar seperti orang Eropa. Orang Arab lebih senang menginventasikan kekayaannya dengan membeli gedung atau rumah yang kemudian disewakan.¹⁷

c) Orang Pribumi

Masyarakat pribumi yang tinggal Hindia Belanda, khususnya Jawa dapat digolongkan menjadi tiga kelas berdasarkan status sosialnya yang didasarkan pada garis keturunan, yaitu:

1) Golongan Pribumi Bangsawan

Yang dimaksud bangsawan adalah mereka yang menjadi Raja dan juga keturunannya yang kemudian menjadi pejabat tinggi pemerintahan atau pangreh praja.¹⁸

2) Golongan Pribumi *Elite* atau Priyayi

Kata priyayi berasal dari kata *yayi* yang berarti adik. Maksudnya adalah adik raja. Jadi orang yang berada pada golongan ini juga termasuk kerabat dari keraton (istana), tetapi silsilahnya sudah jauh dari Raja. Di awal abad ke-20 muncul priyayi atau *elite* baru, mereka pada awalnya adalah rakyat biasa atau rakyat jelata yang kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintahan karena kepintaran, jasa atau kekayaannya. Semenjak itu golongan priyayi ada dua. Priyayi tinggi, yang merupakan keturunan ningrat dan priyayi rendah yang menjadi priyayi karena pendidikan.

3) Golongan Pribumi Rakyat Biasa

Dalam stratifikasi sosial pribumi rakyat biasa berada pada status sosial paling rendah. Mereka adalah penduduk pribumi yang tidak memiliki gelar kebangsawanan dan priyayi. Biasanya mereka adalah para

¹³ John, Joseph Stockdale, John, Eksostisme Jawa, Yogyakarta: Progresif Book, 2010, h. 5.

¹⁴ Mona Lohanda, dkk, *Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2008, h. 140-141.

¹⁵ *Ibid.*, h. 148.

¹⁶ Van den Berg, L.W.C, *Handramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS, 1989, h. 79.

¹⁷ *Ibid.*, h. 88.

¹⁸ Pangreh praja juga disebut dengan pamong raja yang artinya penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang bertugas untuk menangani daerah jajahannya.

buruh, pembantu rumah tangga, pedagang, petani, karyawan swasta, kuli, dan lain sebagainya.

Jumlah kaum atau elit ini kurang dari dua persen dari jumlah seluruh penduduk Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang tinggal di kota, sebagian besar telah terlepas dari pola hidup tradisional. Mereka tinggal di pemukiman pribumi, tetapi gaya hidup mereka telah bercorak Barat.

B. Pelopor Pergerakan

Hingga sekarang ini konflik sosial yang melibatkan etnis Tionghoa masih saja sering terjadi. Hal ini berdampak terhadap jalinan komunikasi yang kurang baik antar sesama anak bangsa. Diskriminasi yang dihadapi minoritas Tionghoa ini merupakan warisan dari kebijakan etnis yang dulu dilakukan pemerintah Hindia Belanda selama berkuasa.

Sebelum kedatangan bangsa Barat, komunitas perantau Tionghoa dapat hidup harmonis dengan penduduk asli Nusantara. Keinginan bangsa barat, dalam hal ini Belanda, untuk dapat menguasai Nusantara serta mengendalikan penduduk di dalamnya, membuat dikeluarkan sebuah kebijakan pengelompokan etnis.¹⁹ Konsep stratifikasi yang dibuat oleh pemerintah yang didasarkan pada perbedaan etnis, tujuannya tidak hanya untuk membedakan hak dan kewajiban dari masing-masing kelompok tersebut. Selain itu merupakan upaya agar tidak terjadinya percampuran darah. Bangsa barat yang merasa superior merasa tidak pantas untuk dapat “berbaur” dengan pribumi atau etnis lainnya. Klasifikasi bangsa barat adalah manusia Eropa, baik itu dari Belanda, Inggris, Spanyol, dan sebagainya. Sementara itu yang dinamakan pribumi adalah mereka yang dianggap sebagai penduduk asli yang telah tinggal sebelum kedatangan bangsa asing.

Adanya pembagian golongan penduduk membuat perbedaan hak dan kewajiban yang

berbeda, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebelum abad ke-20, kesempatan memperoleh pendidikan sangat terbatas hanya bagi segelintir elit Eropa dan bangsawan. Perubahan mulai terjadi ketika politik etis diresmikan, bertepatan dengan kenaikan tahta Ratu Wihelmina pada tanggal 17 September 1901. Dalam pidatonya Ratu menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral dan hutang budi terhadap penduduk pribumi di Hindia Belanda.²⁰ Kebijakan politik etis yang paling menonjol terletak dalam bidang pendidikan. Memang fokus utama kebijakan ini ditujukan kepada penduduk pribumi, tetapi sejalan dengan penerapannya, juga berdampak bagi perubahan penduduk golongan lain.

Diakui, memang pemerintah awalnya tidak memasukkan pendidikan untuk penduduk Tionghoa ke dalam sistem pendidikan. Padahal mereka juga membayar pajak. Dalam kebijakan politik etis belum terdapat rencana perbaikan pendidikan bagi mereka. Sebelumnya, secara mandiri penduduk Tionghoa mendirikan sekolah untuk komunitasnya dengan jumlah yang terbatas. Perubahan mulai terjadi ketika berdirinya sekolah *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK).

Membicarakan pendidikan yang didirikan oleh THHK tidak hanya menyangkut tentang proses pentransferan ilmu tetapi juga permasalahan politik yang dihadapi organisasi tersebut dikemudian hari. Periode awal kehadiran THHK hanya sebatas dibidang kebudayaan dan pendidikan.²¹ Tujuan mulianya

¹⁹ Pieter Creutzberg dan J.T.M Van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

²⁰ Pada bulan September 1902, melalui Menteri Urusan Jajahan A.W.F Idenburg lahir tiga kebijakan utama politik etis yaitu pendidikan, irigasi dan emigrasi, Robert Van Niel, 1984, h. 51-53.

²¹ THHK pertama kali berdiri di Batavia pada tanggal 23 Februari 1901. Lihat Nio Joe Lan, *Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwe Koan Batavia*, Batavia: Tiong Hoa Hwe Koan, 1940, h. 19. Sebelum Sekolah THHK berdiri sudah terdapat Sekolah Tionghoa, tetapi Sekolah Tionghoa tersebut hanya mengajarkan tentang sastra klasik Tionghoa. Sistem pendidikan seperti itu dianggap tidak sesuai untuk penduduk Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda. Di Sekolah THHK diajarkan Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris serta budaya Tionghoa sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Oleh karena itu Sekolah THHK dianggap sebagai pelopor pemberian pendidikan yang lebih modern bagi penduduk Tionghoa.

hanya masih berkuat untuk mereformasi adat istiadat dan tradisi penduduk Tionghoa di Hindia Belanda sekaligus menjadi pusat wadah pergerakan. Meskipun masih sebagian kecil yang menyadari pentingnya persatuan, tapi THHK dapat dianggap sebagai cikal bakal organisasi pergerakan etnis minoritas ini.

Antusiasme yang besar dari masyarakat diluar dugaan awal. Dalam kurun waktu yang singkat beberapa cabang THHK didirikan di luar Batavia. Tidak hanya itu, THHK juga merambah bidang pendidikan. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tidak demikian dengan sekolah THHK yang menggunakan bahasa Mandarin. Pemilihan bahasa pengantar ini telah menunjukkan ke arah mana orientasi politik sekolah ini. Keputusan THHK tersebut menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda yang selama ini percaya bahwa etnis Tionghoa akan loyal dan mudah diatur. Tidak seperti golongan pribumi yang sering membuat kekacauan dengan melakukan berbagai aksi perlawanan dan pemberontakan, serta banyak tuntutan.

Bagi pemerintah Hindia Belanda, sekolah THHK dianggap seperti duri dalam daging. Jika terus diabaikan tentu akan dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa semena-mena menutup organisasi ini. Jika ini dilakukan akan dapat menyulut amarah etnis Tionghoa. Mengingat banyak dari mereka menjadi pengusaha yang berpengaruh besar dalam aktivitas ekonomi di Hindia Belanda, maka jalan damai dipilih pemerintah dengan mendirikan sekolah tandingan, yaitu *Hollandshe Chineesche School* (HCS). Sekolah ini merupakan sekolah milik pemerintah yang kurikulumnya mengikuti aturan resmi.²² Kemunculan sekolah baru ini membuat penduduk Tionghoa memiliki pilihan untuk pendidikan anak-anaknya. Sulit menentukan di antara kedua sekolah tersebut

²² Sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda memiliki tiga jenis sekolah dasar. *Europeessche Lagere School* (ELS), *Hollandsche Inlandsche School*, dan *Hollandshe Chineesche School* (HCS). Masing – masing berbeda peruntukannya, didasarkan pada golongan etnis dan status sosial.

mana yang lebih mereka sukai, karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda.

Sementara itu tidak semua penduduk Tionghoa menyukai keberadaan THHK. Pilihan sekolah THHK untuk menggunakan bahasa Mandarin bukannya bahasa Hokkian atau bahasa daerah China lainnya dianggap sebagai pengingkaran terhadap leluhur, bertentangan dengan tujuan awalnya yang ingin melestarikan budaya. Selain itu, sistem sekolah THHK yang modern dianggap tidak sesuai dengan sistem pendidikan klasik Kekaisaran China. Terakhir, sekolah THHK memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat bersekolah.²³ Kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan etika. Seperti halnya suku Jawa pada masa itu, penduduk Tionghoa juga menganut sistem patriarki.

Sekolah THHK menjadi tanda kemunculan sekolah Tionghoa modern. Penduduk Tionghoa menaruh harapan yang besar kepada sekolah ini. Banyaknya penduduk Tionghoa yang bersekolah di Sekolah THHK berdampak pada ditutupnya berbagai sekolah Tionghoa lama. Misalnya sekolah Tionghoa *Gie Ook* yang telah didirikan sebelum abad ke- 20 ditutup pada tahun 1904 karena sistem pembelajarannya yang dianggap kuno.²⁴

²³ Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2009, h. 8.

²⁴ Liem Thian Joe, *Riwayat Semarang*, Jakarta: Hasta Wahana, 2004, h. 210.

Meskipun satu induk organisasi, cabang – cabang sekolah THHK secara umum terbagi ke dalam tiga jenis. 1) Sekolah THHK yang mengarah kepada keagamaan, didirikan oleh golongan yang ingin supaya Tionghoa yang ada di Hindia Belanda dapat mengerti huruf dan bahasa Tionghoa. Sehingga dapat memahami kitab - kitab agama Khonghucu, 2). Sekolah THHK yang mengarah kepada kegiatan kebangsaan. Sekolah model ini didirikan oleh golongan pengiat budaya. Tujuannya sekolah menanamkan sifat kebangsaan dan menginginkan supaya para peranakan bisa lebih mudah mengenal huruf dan bahasa mereka sendiri sehingga dapat mengerti kitab-kitab klasik. 3). Sekolah THHK yang mengarah kepada kegiatan sosial-politik. Golongan ini menggunakan Sekolah THHK untuk mempengaruhi dan mendesak pemerintah Hindia Belanda agar menaruh perhatian kepada pendidikan anak-anak Tionghoa. Sekolah ini menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris sebagai bahasa pengantar. Lihat Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2003, h. 243-244.

Keberanian THHK untuk tampil beda, nyatanya telah memberikan inspirasi bagi penduduk Tionghoa di Hindia Belanda untuk dapat memperjuangkan kesetaraannya terhadap penduduk Eropa serta hak akan suaranya untuk didengar seperti halnya pribumi. Kebijakan yang diambil THHK tidak lepas dari pengaruh politik dari negeri China. Berbagai bantuan, termasuk dana diberikan Kaisar Dinasti Qing. Tidak hanya itu, kelompok revolusioner China yang dipimpin Sun Yat Sen ikut pula membantu.²⁵

Bahkan para pendukung Sun Yat Sen ada yang datang ke Hindia Belanda dengan menjadi guru di sekolah-sekolah THHK. Adanya dukungan dari dua kelompok politik yang berbeda dan berlawanan ini menandakan bahwa penduduk Tionghoa di Hindia Belanda memang masih dianggap bagian dari rakyat China yang juga harus ikut untuk disejahterakan.

Kedekatan hubungan THHK dengan negeri China juga ditunjukkan dengan seringnya Kaisar mengirim utusannya yaitu inspektur sekolah untuk meninjau sekolah-sekolah THHK. Pada November 1907 pernah datang dua orang *kruisers* (penjelajah) bernama Hay Yong dan Hay Kie. Mereka bertugas mengantar tiga utusan kaisar Tionghoa yaitu Kim Tjhe Tay Sien dan Yo Soe Kie yang merupakan wakil presiden dari *Departement van Landbouw* negeri Tionghoa. Dampak dari kedatangan para utusan ini adalah didirikannya *Khaj Lam Tay Hak* di Nanking. Sebuah badan pendidikan yang membantu anak-anak Tionghoa di Jawa agar dapat lebih mudah melanjutkan sekolah di negeri China.²⁶ Keakraban ini menjadi tanda tanya bagi pemerintah Hindia Belanda. Mulai dari sini kesetiaan terhadap Hindia Belanda mulai dipertanyakan.

²⁵ Untuk mencukupi dana tidak sepenuhnya para pengurus THHK bergantung dari bantuan negeri China. Secara mandiri mereka juga mampu untuk membiayai organisasinya dengan mendirikan suatu kongsi dagang. Pada Desember sebuah kongsi dagang bernama N.V. Java Ien Boe didirikan di Semarang yang menjual barang-barang buatan negeri China untuk mencukupi kebutuhan biaya Sekolah THHK. Lihat Nio Joe Lan, *Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwe Koan Batavia*, Batavia: Tiong Hoa Hwe Koan, 1940, h. 230.

²⁶ *Ibid.*, h. 226-228.

Menurut Ongklohan, pergerakan yang dilakukan THHK ini merupakan gerakan terbatas yang bertujuan untuk kemajuan golongan mereka sendiri.²⁷ Mereka memang juga tidak menyukai sikap kolonialisme pemerintah yang dianggap diskriminatif serta kurang mepedulikan kesejahteraan penduduk Tionghoa, tetapi pergerakan THHK pada periode ini belum mengarah kepada perjuangan untuk kemerdekaan.

C. Dampak Reformasi Pendidikan

Akar permasalahan penduduk Tionghoa tidak hanya disebabkan oleh sikap pemerintah yang menganggap mereka masih sebagai orang asing. Di sisi lain setidaknya mereka mengklasifikasikan diri ke dalam dua jenis golongan yaitu totok dan peranakan. Masing-masing memiliki pandangan budaya yang berbeda. Peranakan merupakan hasil perkawinan campuran dengan penduduk setempat.²⁸ Totok akan dapat kembali ke negeri China jika sudah memiliki uang, sedangkan peranakan tidak dapat kembali. Oleh karena itu, para peranakan harus dapat bersahabat dengan penduduk pribumi untuk kelangsungan hidupnya.²⁹ Selain itu status kewarganegaraan mereka juga masih menjadi tanda tanya.³⁰ Adanya dwikewarganegaraan membuat posisi penduduk Tionghoa menjadi sulit karena tidak bisa menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya secara penuh.

²⁷ Ongklohan, *Pengaruh Gerakan Tionghoa dalam Kebangkitan Nasional*, dalam Abdul Baqir Zein, *Etnis Tionghoa dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000, h. 146-151.

²⁸ Sulityowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 213.

²⁹ *Ibid.*, h. 214.

³⁰ Pada tahun 1910, pemerintah Belanda telah mengeluarkan Undang-Undang yang bernama *Wet Hondende Regeling Van Het Nederlands Onderdaanschap*. Secara resmi Undang-Undang ini menetapkan penduduk pribumi dan orang-orang bukan pribumi yang lahir di tanah jajahan Belanda sebagai warga negara Belanda. Oleh karena itu para peranakan dan perantau Tionghoa di Hindia Belanda ditetapkan secara sepihak sebagai warga negara Belanda. Dengan demikian timbullah masalah dwikewarganegaraan dari perantau ini, karena di satu sisi mereka masih menjadi warga negara China.

Adanya perbedaan antara totok dan peranakan membuat masing-masing dari mereka merasa berbeda satu sama lain. Rasa nasionalisme masing-masing dari mereka juga berbeda. Hal ini membuat diantara mereka sulit tumbuh perasaan bahwa mereka satu bangsa. Kehidupan penduduk Tionghoa di Hindia Belanda secara tidak langsung terpengaruh oleh keadaan politik di negeri China. Terjadinya pergerakan serta perubahan besar di negeri China pada 1911 yaitu peristiwa revolusi Xinhai, juga menjalar di Hindia Belanda. Mereka menginginkan perubahan kedudukan serta sudah tidak lagi mempedulikan antara totok dan peranakan.³¹

Berjalannya waktu THHK menjadi berkembang besar. Penduduk Tionghoa memaknai pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan tetapi sebagai wadah persatuan dan juga alat aspirasi politik. Sejatinnya pendidikan adalah suatu upaya mulia untuk mencerdaskan dan memerdekakan pikiran seseorang. Tetapi pendidikan dapat menjadi hal yang menakutkan jika di dalamnya telah terselip ideologi yang secara terencana ingin ditanamkan kepada para siswa. Hal ini yang ditakutkan pemerintah Hindia Belanda, bahwa sekolah THHK akan menyelipkan ideologi politiknya yang dianggap bersifat anti kolonial kepada siswanya. Ketakutan ini didasarkan pada keberanian siswa THHK untuk membuat perkumpulan. Seperti yang dilakukan siswa THHK Semarang yang mendirikan perkumpulan *Hsiao You Hui* pada 1913. Kedepannya perkumpulan ini berubah menjadi organisasi kepemudaan dan berganti nama menjadi *Hua Chiao Tsing Nien Hui* pada 1929. Sementara itu semangat nasionalisme tumbuh melalui proses waktu yang lama. Ketika bibit nasionalisme mulai muncul di hati penduduk Tionghoa, arahnya kembali terpecah terbagi ke dalam tiga jalur yaitu, pendukung negeri China, pendukung pemerintah kolonial, dan pendukung kemerdekaan Indonesia.

³¹ Liem Thian Joe, *Riwayat Semarang*, Jakarta: Hasta Wahana, 2004, h. 206.

Dalam perkembangan beberapa tahun kemudian, dampak dari reformasi pendidikan membuat lahirnya para tokoh Tionghoa terdidik. Eksistensi mereka kemudian mulai merambah ke pers. Bidang jurnalis pada masa itu menjadi suatu kegiatan yang eksklusif. Hanya orang pintar serta terdidik saja yang bisa masuk ke bidang ini, dan jumlah mereka hanya segelintir saja. Pers menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan anti kolonial serta menjadi barometer perasaan kolektif dan menjadi wakil dari opini publik. Salah satu pers lokal yaitu *Sinar Djawa*³² dan *Djawa Tengah*. Apa yang dirasakan penduduk Tionghoa dapat tercermin melalui surat kabar secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran mereka akan identitas bangsanya.

Dukungan permodalan yang kuat menjadikan pers mereka mampu menampilkan wajah penerbitan dengan mutu yang tidak kalah tinggi dibandingkan dengan pers milik orang Barat. Bahkan surat kabar Tionghoa ini memiliki kelebihan lain yang membuatnya berkembang lebih luas. Beberapa surat kabar mereka menggunakan Bahasa Melayu sehingga juga dapat dibaca oleh penduduk pribumi. Dengan demikian pers ini juga dapat dijadikan sebagai media asimilasi. Apabila pers Tionghoa mengalami kekurangan dana mereka dapat meminta bantuan kepada para pengusaha. Salah satunya Oei Tiong Ham, pengusaha gula dari Semarang, yang membantu dana untuk surat kabar *Keng Po* dan *Matahari*.³³

Hampir semua pers Tionghoa pada periode ini masih memiliki orientasi politik ke negeri

³² Awalnya *Sinar Djawa* milik Si Hian Ling. Pada 1913 surat kabar ini berpindah kepemilikan di tangan Sarekat Islam dan berganti nama menjadi *Sinar Hindia* yang merupakan surat kabar pertama pribumi di Semarang.

³³ Sekolah THHK telah memberikan inspirasi bagi para pengusaha Tionghoa untuk ikut berkontribusi. Banyak pengusaha yang biasanya mempunyai sifat pelit dengan sukarela menyumbangkan uangnya untuk kemajuan pendidikan komunitasnya. Misalnya Ong Tiong Ham dan para pengusaha lainnya mengumpulkan dana pendidikan. Mereka kemudian menggunakan dana tersebut untuk mendirikan Sekolah *Hoa Ing Tiong Hak* pada 15 Maret 1916. Sekolah ini diperuntukkan bagi lulusan Sekolah THHK. Liem Thian Joe, *Riwayat Semarang*, Jakarta: Hasta Wahana, 2004, h. 259.

China dan tidak mau terlibat dalam politik lokal. Sikap apolitik dalam kancah politik lokal semakin menguat setelah Konferensi Masyarakat Tionghoa di Semarang pada 1917. Dalam Konferensi ini, pandangan politik surat kabar *Sin Po*³⁴ mendapatkan dukungan luas yaitu anjuran persatuan penduduk totok dan peranakan serta peningkatan kualitas pendidikan bagi peranakan. *Sin Po* juga menganjurkan bahwa penduduk Tionghoa di Hindia Belanda diharapkan dapat memberikan kontribusi politik terhadap negeri China yang sedang berada dalam kondisi terjajah bangsa Jepang. Meskipun demikian, *Sin Po* masih belum mendukung penduduk Tionghoa untuk terjun dalam politik lokal karena dapat memecah belah persatuan.³⁵

Upaya untuk bersatu dan bersepakat merupakan hal yang tidak mudah diwujudkan. Perdebatan di kalangan penduduk Tionghoa mengenai pendidikan kembali terjadi pada 1925. Salah seorang tokoh bernama Kwee Hing Tjiat menyerukan untuk menutup Sekolah THHK karena dianggap tidak sesuai bagi penduduk Tionghoa yang memilih untuk tetap tinggal di Hindia Belanda.³⁶ Buku-buku pelajaran sekolah THHK diimpor secara langsung dari Singapura dan negeri China yang isinya dianggap tidak

sesuai dengan kondisi di Hindia Belanda. Propaganda yang ia lakukan tersebut akhirnya melahirkan organisasi *Tiong Hoa Kauw Yok Gian Kio Hwee* (Perkumpulan Penelitian Pendidikan Tionghoa). Perkumpulan ini mengadakan sebuah konferensi yang hasilnya memutuskan mendirikan sebuah sekolah teladan untuk anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda. Jika sekolah tersebut sukses, maka akan diperbanyak. Namun rencana tersebut gagal karena kekurangan dana dan tidak mendapat dukungan dari penduduk Tionghoa.³⁷ Tidak adanya titik temu dalam konferensi tersebut, karena mereka yang terlibat di dalamnya terbagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda terhadap pendidikan.

Pada tahun 1934 Kwee Hing Tjiat mendirikan surat kabar *Matahari* di Semarang.³⁸ Ia merupakan sosok jurnalis terkenal karena sikapnya yang dengan berani mengatakan akan berjanji membela tanah air Indonesia.³⁹ Sikapnya ini membuatnya menjadi cibiran di kalangan komunitasnya. Meskipun demikian ada pula penduduk Tionghoa yang sependapat dengannya. Hal ini menunjukkan mulai terjadi perubahan orientasi politik di kalangan etnis minoritas ini. Intensitas pers ini yang selalu mengobarkan semangat nasionalisnya dapat menuai hasil. Banyak dari penduduk Tionghoa mulai terpengaruh dengan kegiatan pergerakan politik yang dilakukan penduduk pribumi. Terjadi perubahan orientasi nasionalisme karena mulai adanya harapan bahwa Hindia Belanda suatu saat akan merdeka.

³⁴ *Sin Po* terbit pertama kali di Batavia pada 1910. Surat kabar ini merupakan surat kabar Tionghoa yang terkenal di Hindia Belanda. Awalnya *Sin Po* berhaluan politik kepada negeri China tetapi kemudian mendukung pergerakan nasional yang dilakukan penduduk pribumi untuk perjuangan kemerdekaan. Bahkan dengan berani menyuarakan agar penduduk Tionghoa berani untuk melawan tirani pemerintahan Hindia Belanda dan lebih baik menyatakan kesetiaannya terhadap tanah air Indonesia.

³⁵ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKIS, 2001, h. 201.

³⁶ Leo Suryadinata, *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia; Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hiem*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, h. 25.

Bagi totok, sekolah THHK merupakan sekolah yang ideal. Sementara bagi peranakan lebih memilih untuk bersekolah di HCS karena kurikulumnya sesuai dengan standar pemerintah Hindia Belanda. Dalam kaitannya pemilihan sekolah antara totok dan peranakan masalah biaya juga menjadi bahan pertimbangan. Biaya sekolah THHK lebih mahal daripada di HCS. Dengan demikian bahwa perbedaan pandangan antara totok dan peranakan juga berkaitan dengan status ekonomi.

³⁷ *Ibid*, h. 44.

³⁸ Surat kabar ini lebih dikenal oleh masyarakat sebagai *Baba Dewasa*. Pada masa awal penerbitan, surat kabar ini dipimpin langsung oleh Kwee Hing Tjiat dengan staf redaktur Kwee Thiam Tjing, Tjoa Tjoe Liang, dan AR Baswedan. Awalnya, Kwee Hing Tjiat ingin memberi nama surat kabar ini *Merdika* dan mengecat merah kantornya. Sayangnya, niatan tersebut urung diwujudkan karena dilarang oleh Pemerintah Belanda kala itu. Nama surat kabar ini pun diganti menjadi *Matahari*, sedangkan kantornya tetap dicat merah namun diselingi oleh cat kuning. [http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari_\(surat_kabar\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari_(surat_kabar)), diakses 20 April 2016.

³⁹ Yunus Yahya, *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003, h. 16.

Sekolah THHK telah memberikan banyak pengaruh bagi perkembangan penduduk Tionghoa di Hindia Belanda. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga merubah pola pikir penduduk Tionghoa. Mereka mulai bersatu dan saling membantu setelah lahirnya sebuah pendidikan modern yang diciptakan oleh Sekolah THHK. Selain itu dampak dari pendidikan adalah munculnya keberanian penduduk Tionghoa untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Peran Komunitas Tionghoa dalam Upaya Kemerdekaan

Nasionalisme jika dilihat dari kacamata sosio budaya merupakan fenomena yang diperlukan oleh zaman modern. Bangsa-bangsa adalah kaum budaya tinggi yang terdidik, disalurkan melalui sekolah serta didukung sistem pendidikan yang terstandarisasi. Dengan melatih orang menjadi terdidik maka akan mendorong nasionalisme.⁴⁰

Reformasi pendidikan yang dipelopori oleh THHK telah melahirkan penduduk Tionghoa yang terdidik. Sejalan dengan itu, hal yang sama juga dialami oleh penduduk pribumi. Perbaikan pendidikan melalui program politik etis telah melahirkan elit pribumi terdidik. Pendidikan yang mereka dapatkan telah mendewasakan pandangan politik kedua golongan yang berbeda ini. Dari awal para elit pribumi telah konsisten untuk bersikap anti kolonial dan ingin memerdekakan diri dari Belanda. Tidak demikian dengan hal penduduk Tionghoa yang masih terkatung-katung menentukan arah dan tujuan politik. Memasuki tahun 1920-an, beberapa tokoh Tionghoa ini mulai secara perlahan berani untuk menyatakan diri bergabung bersama tokoh pribumi untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemerdekaan.

Peran para Tionghoa nasionalis dalam sejarah kebangsaan sudah dapat dilihat ketika peristiwa Sumpah Pemuda pada 1928. Peristiwa

yang terjadi di Jakarta ini dianggap sebagai deklarasi persatuan seluruh etnis bangsa untuk menjadi bagian dari tanah air Indonesia. Tempat dibacakannya Sumpah Pemuda adalah rumah indekost milik orang Tionghoa bernama Sie Kok Liong yang beralamat di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. Secara sadar ia memfasilitasi dan tahu bahwa rumahnya tersebut dijadikan markas bagi organisasi kepemudaan. Selain itu terdapat pula nama Kwee Thiam Hong, Ong Kay Sing, Liauw Tjoan Hok dan Tjio Djin Kwie yang ikut terlibat dalam peristiwa ini. Sementara itu harian SinPo menjadi surat kabar pertama yang menyiarkan lagu Indonesia Raya gubahan Wage Rudolf Supratman pada November 1928 serta menyebarluaskan penggantian nama Hindia Belanda menjadi Indonesia. Keberanian ini menjadi suatu hal yang patut diapresiasi, mengingat para periode tersebut pemerintah Hindia Belanda sedang getol menangkap para tokoh anti kolonial dan nasionalis yang kemudian akan dibuang seperti ke Boven Digoel.

Kemunculan nasionalisme bukan karena kebetulan ataupun penemuan tetapi melainkan hasil dari proses modernitas yang melibatkan upaya pendidikan dari segenap masyarakat. Hasil nyata dari reformasi pendidikan ini tidak hanya melahirkan ideologi baru tetapi juga terbentuknya komunitas manusia yang baru, jenis identitas kolektif yang baru, jenis politik yang baru, dan pada akhirnya juga jenis tatanan masyarakat yang baru. Persamaan akan identitas budaya secara kolektif dijadikan tali penyambung persatuan.⁴¹ Hal ini telah terjadi di Indonesia, ketika kesadaran akan nasionalisme telah mampu mengubah dinamika kehidupan masyarakat.

Perasaan saling menghargai mulai tumbuh dari masing-masing pihak dengan mengganti kata sebutan dengan kata lain yang dianggap lebih sopan. Semenjak Sumpah Pemuda, kata pribumi atau *inlander* diganti menjadi bumiputera. Sementara sebutan Tionghoa terhadap etnis minoritas ini diganti menjadi dengan kata Tionghoa. Langkah ini kemudian diikuti oleh semua surat kabar.

⁴⁰ Anthony D. Smith, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, h. 59.

⁴¹ *Ibid*, h. 58.

Tantangan terbesar penduduk Tionghoa adalah ketengangan rasa persaudaraan dalam sesama bangsanya yang terwujud dalam pendirian partai-partai politik yang saling bertolak belakang. Tidak semua penduduk Tionghoa telah menyatakan kesetiaannya pada Indonesia dan berani melawan kolonialisme. Hal ini yang ditunjukkan oleh organisasi politik *Chung Hwa Hui* (CHH) yang didirikan pada tahun 1928. Keraguan mereka bahwa suatu saat nanti akan lahir sebuah Republik yang merdeka menjadi dasar propagandanya. Dalam pandangannya lebih baik penduduk Tionghoa tetap setia kepada Belanda yang dianggap akan dapat memberikan perlindungan. Menjadi *Nederlands Onderdean* merupakan suatu kenyataan oleh karenanya mereka lebih mendukung pendidikan Belanda daripada pendidikan Tionghoa. Tetapi ketika perubahan kekuasaan, saat Jepang berkuasa organisasi ini mengerdil dengan sendirinya.

Jika CHH secara terang-terangan bersikap antipati berbeda halnya dengan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada 25 September 1932. Para pendirinya seperti Liem Koen Hian telah mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya mendukung gerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. PTI bersikap anti kolonial dan menolak nasionalisme yang condong ke China. PTI juga meminta agar masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda untuk menyatakan dirinya sebagai masyarakat Indonesia dan ikut membantu upaya dari kalangan nasionalis Indonesia dalam membentuk sebuah pemerintahan sendiri dan akhirnya Indonesia yang merdeka melalui cita-cita konstitusional.⁴² Kegesitan PTI membuat organisasi ini berhasil mendapatkan 1 kursi di dalam *Volksraad* pada periode tahun 1935-1939. Sangat sulit sekali bagi masyarakat atau organisasi non Eropa untuk dapat masuk ke dalam *Volksraad*. Bahkan Soekarno menganggap bahwa visi partai ini sama dengan visi partainya yaitu PNI.

⁴² Nuraini Soyomukti, *Soekarno dan Tionghoa*, Yogyakarta: Garasi, 2012, h. 146.

PTI merupakan contoh dari keberpihakan masyarakat Tionghoa kepada Indonesia dan memiliki kepedulian untuk memperjuangkan kemerdekaan. Partai ini juga mendukung lahirnya GERINDO (Gerakan Rakyat Indonesia) pada 18 Mei 1937.⁴³ Oei Gee Hwat yang merupakan sekretaris pengurus besar PTI juga menjadi salah satu pengurus Gerindo.⁴⁴ Dapat masuknya penduduk Tionghoa ke dalam partai yang mayoritas berisi penduduk pribumi dapat dimaknai dalam tiga hal. *Pertama*, bahwa penduduk pribumi sendiripun juga telah menerima keberadaan etnis minoritas ini sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. *Kedua*, memasuki periode tahun 1930an, mayoritas orientasi politik penduduk Tionghoa mulai condong kepada Indonesia. *Ketiga*, pada periode ini dapat dikatakan bahwa kekuasaan politik pemerintah Hindia Belanda sedang melemah sehingga politik etnis yang telah diterapkan mulai memudar.

Setelah pergantian kekuasaan, dimana Jepang berkuasa di Indonesia, peran para tokoh Tionghoa semakin luas, karena mereka dapat membaca kanji. Kontak komunikasi yang baik juga ditunjukkan oleh Soekarno yang menjadi sosok panutan masyarakat Indonesia. Ketika Soekarno berpidato pada sidang *Dokuritsu Junbi Cosaki* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ia mengatakan bahwa ideologi Pancasila dipengaruhi oleh pemikiran Sun Yat Sen, pemimpin revolusi China. Dalam sidang inipun juga dihadiri segelintir penduduk Tionghoa.⁴⁵ Keterlibatan penduduk Tionghoa tidak hanya terbatas pada kepartaian. Ada seorang

⁴³ Gerindo merupakan "titisan" dari Pertindo yang dibubarkan pada satu tahun sebelumnya yaitu pada 1936. Tujuan Gerindo adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan cara yang kooperatif. Tokoh termasyur dari organisasi ini adalah A.K. Gani, Moh. Yamin, Amir Syarifuddin, Sartono, Walopo, Sarino Manunsarkono, dan Nyonoprawoto. Menurut M. Yamin akan bekerja untuk mewujudkan sebuah parlemen. Bahkan Gerindo berpartisipasi dalam pemilihan dewan kota dan *Voksraad*, dimana ia bersaing dengan Parindra yang selalu mengalami kekalahan. Oleh karena sikap kooperatifnya, Gerindo cukup ditakuti oleh pihak berwenang.

⁴⁴ *Op.cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

Tionghoa dilibatkan dalam meresmikan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu Jap Tjwan Bing.⁴⁶

Setelah proklamasi kemerdekaan situasi Indonesia belum kondusif. Masih terjadi peperangan antara Republik dengan Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan ini, masyarakat Tionghoa juga aktif bersama-sama pemuda lainnya menghadapi pertempuran. Mereka semua berjuang tanpa pamrih. Pada gilirannya perang kemerdekaan tersebut merupakan pemicu bagi kuatnya akar nasionalisme.

III. Penutup

Kemunculan penduduk Tionghoa dalam dunia politik tidak lepas dari perkembangan organisasi THHK. Meskipun demikian, persatuan dan kesepakatan tentang arah nasionalisme penduduk Tionghoa tidak mudah terwujud. Meskipun satu etnis tetapi mereka masih terkotak-kotak. Ikatan budaya dan sejarah yang terjalin antara penduduk Tionghoa dengan negeri China dan Indonesia membuat dualisme nasionalisme dalam etnis ini pada era kolonial. Secara umum arah orientasi nasionalisme mereka terbagi menjadi tiga, mengarah ke negeri China, setia terhadap Belanda, dan cinta terhadap Indonesia.

Pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia yaitu mentransfer ilmu guna mencerdaskan sumber daya manusia. Sayangnya, sistem pendidikan tidak dapat lepas dari unsur politik. Termasuk sekolah-sekolah Tionghoa pada masa itu yang juga dijadikan sebuah alat untuk dapat membentuk identitas dan sikap nasionalisme.

Reformasi pendidikan telah berdampak besar dalam aktivitas politik penduduk Tionghoa ini. Mereka mulai berani menyuarakan pendapatnya, salah satunya melalui bidang jurnalistik. Surat kabar yang didirikan oleh para tokoh Tionghoa memiliki peran penting dalam penentuan arah nasionalisme mereka. Tentunya keadaan ini membuat posisi mereka

semakin memiliki nilai tawar baik di kalangan penduduk pribumi dan pemerintahan Hindia Belanda.

Sama halnya dengan yang dialami penduduk pribumi, dampak pendidikan juga membuat munculnya elit baru dalam komunitas Tionghoa. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Para elit baru ini telah memulai untuk merajut jalinan komunikasi yang baik para tokoh Tionghoa dengan tokoh pribumi serta berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Bergabungnya para tokoh Tionghoa dalam upaya pergerakan cita-cita kemerdekaan menjadikan mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bagi pemerintah pada masa sekarang diharapkan tidak lagi mengeluarkan kebijakan peraturan yang bersikap diskriminasi terhadap etnis minoritas ini. Program asimilasi antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya masih sangat diperlukan untuk menghilangkan sikap dan sifat antipati dari masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Carey, Peter, *Orang Tionghoa, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Tionghoa 1755-1825*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Creutzberg, Pieter dan J.T.M Van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Hidayat, Komaruddin dan Putut Widjanarko, *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Mizan, 2008.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi* Jilid 1, terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.

⁴⁶ *Ibid*, 147.

- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Joe, Liem Thian, *Riwayat Semarang*, Jakarta: Hasta Wahana, 2004.
- Joseph Stockdale, John, *Eksotisme Jawa*, Yogyakarta: Progresif Book, 2010.
- Kasmadi, Hartono dan Wiyono, *Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950*, Jakarta: Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Katodirdjo, Sartono, *Memori Serah Jabatan 1921-1930: Jawa Tengah*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.
- Lohanda, Mona, dkk, *Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Lan, Nio Joe, *Riwayat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwe Koan Batavia*, Batavia: Tiong Hoa Hwe Koan, 1940.
- Robinson, Philip, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Setiono, Benny G, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2003.
- Smith, Anthony D, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Soyomukti, Nurani, *Soekarno dan Tionghoa*, Yogyakarta: Garasi, 2012.
- Stevens, Th, *Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Suhandinata, Justian, *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Suryadinata, Leo, *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia; Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hiem*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Van den Berg, L.W.C, *Handramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS, 1989.
- Van Niel, Robert, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Yahya, Yunus, *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.
- Zein, Abdul Baqir, *Etnis Tionghoa dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000.

Arsip

- “Regeerings Almanak 1930”, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- “Regeerings Almanak 1940”, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- “Volkstelling 1930”, Arsip Nasional Republik Indonesia.